

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa ketiga OMS tersebut sama-sama melakukan upaya pemberantasan korupsi namun dengan cara yang berbeda-beda, yakni LSM Gertak melakukan upaya represif, LSM GMPK melakukan upaya edukatif, dan Ormas GNPk-RI melakukan upaya preventif dan represif. Melihat pada peranannya dalam pemberantasan korupsi, LSM Gertak menjalankan fungsi pemberdayaan, advokasi dan kontrol sosial sebagai OMS memberikan kemajuan pada tata kelola pemerintah Kabupaten Batang yang lebih bersih dan transparan.

Sedangkan LSM GMPK hanya menjalankan fungsi pemberdayaan, dan GNPk-RI hanya menjalankan fungsi *social control*. Hal ini dikarenakan kurangnya jangkauan ke masyarakat secara meluas, sehingga *output* yang dihasilkan berupa angka korupsi yang tidak menurun secara signifikan. Penguatan fungsi OMS erat kaitannya dengan pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang. Mengingat fungsi-fungsi yang dimiliki OMS dapat menjadi penyeimbang pemerintah, sehingga ketiga fungsi tersebut perlu dilakukan bersamaan.

## 4.2 Saran

Dengan permasalahan korupsi dan upaya pemberantasan yang telah dilakukan oleh LSM Gertak, GMPK, dan GNPK-RI, penelitian ini merekomendasikan beberapa opsi dalam menangani persoalan, di antaranya:

1. Sebaiknya pengawasan yang dilakukan OMS tidak hanya ditujukan pada pemerintah Kabupaten Batang saja melainkan pihak-pihak lainnya yang rawan merugikan masyarakat. Disamping itu, OMS sebagai kelompok yang dinilai mampu menekan pemerintah agar lebih bersih dan transparan, dapat melakukan koordinasi secara sistematis kepada pemegang kekuasaan agar mempengaruhi pembuat kebijakan untuk lebih tegas dan dalam menindak kasus korupsi yang terjadi.
2. OMS di Kabupaten Batang sebagai representasi masyarakat sipil dapat meningkatkan transparansi tata kelola OMS sendiri yang dapat dijangkau masyarakat sipil secara umum, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan merasakan dampak dari upaya-upaya yang dilakukan OMS kaitannya dengan pemberantasan korupsi.
3. OMS di Kabupaten Batang semestinya terhubung dengan gerakan anti korupsi yang resmi sehingga pelaksanaan pemberantasan korupsi berjalan beriringan serta bebas dari kendala-kendala yang menjadikan OMS di Kabupaten Batang tidak dipercaya oleh masyarakat.

4. Perlu adanya penguatan birokrasi yang bersih dari korupsi di Kabupaten Batang baik di lingkup daerah maupun yang lainnya dengan menanamkan sikap anti korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, juga dengan penguatan regulasi terkait tindak pidana korupsi.
5. Perlu dilakukan studi lanjutan untuk menjelaskan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran OMS dalam memberantas korupsi secara efektif dan berdampak besar kepada angka korupsi yang ada.